Upaya Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Yogyakarta dalam Meningkatkan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan Melalui Skema *Government To Government* Korea Pasca COVID-19 Tahun 2023

Ida Farhanisa[1]*, Bagus Subekti Nuswantoro[2] , Yeyen Subandi[3], Diansari Solihah Amini[4], Tanti Nurgiyanti[5], Harits Dwi Wiratma[6]
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Respati Yogyakarta[1-6]
*e-mail: idafarhanisa12@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Yogyakarta dalam meningkatkan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan melalui skema *Government to Government* (G-to-G) pasca pandemi COVID-19 tahun 2023. Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap mobilitas pekerja migran, termasuk penurunan penempatan PMI, pemutusan hubungan kerja, serta keterbatasan akses kesehatan dan perlindungan kerja di negara tujuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan magang di BP3MI Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP3MI Yogyakarta berperan aktif dalam meningkatkan penempatan PMI melalui penyebaran informasi peluang kerja, verifikasi dokumen, fasilitasi orientasi pra-pemberangkatan, pemberkasan skema G-to-G Korea, serta penguatan kerja sama dengan lembaga terkait. Selain itu, BP3MI juga menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya, pemahaman calon PMI terhadap prosedur, serta kompleksitas regulasi pasca pandemi. Secara keseluruhan, upaya BP3MI Yogyakarta melalui skema G-to-G Korea mampu mendukung pemulihan penempatan PMI secara bertahap dan meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan pekerja migran Indonesia.

Kata kunci : *BP3MI Yogyakarta; Pekerja migran Indonesia; G-to-G Korea; Kerjasama internasional; Pasca COVID-19.*

ABSTRACT
This study aims to analyze the efforts of the Indonesian Migrant Worker Protection Service Center (BP3MI) Yogyakarta in increasing the placement of Indonesian Migrant Workers (PMI) to South Korea through the Government to Government (G-to-G) scheme in the post-COVID-19 period in 2023. The COVID-19 pandemic significantly affected migrant worker mobility, including a decline in PMI placement, job termination, limited access to health services, and labor protection in destination countries. This study employed a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation conducted during the internship program at BP3MI Yogyakarta. The results indicate that BP3MI Yogyakarta plays an active role in increasing PMI placement through the dissemination of job opportunity information, document verification, pre-departure orientation facilitation, G-to-G Korea documentation processing, and strengthening cooperation with related institutions. However, BP3MI also faces several challenges, such as limited resources, insufficient understanding of procedures among prospective PMI, and regulatory complexities in the post-pandemic period. Overall, BP3MI Yogyakarta's efforts through the G-to-G Korea scheme support the gradual recovery of PMI placement while improving protection and welfare for Indonesian migrant workers.

Keywords **:** *BP3MI Yogyakarta; Indonesian migrant workers; G-to-G Korea; International cooperation; Post-COVID-19.*

PENDAHULUAN
Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan global, termasuk sektor ekonomi, sosial, dan mobilitas tenaga kerja internasional. Virus yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan ditetapkan sebagai darurat kesehatan global oleh World Health Organization pada Januari 2020 serta dinyatakan sebagai

pandemi pada Maret 2020 (Noveria & Romdiati, 2022; Syukur et al., 2021). Kondisi ini menyebabkan gangguan signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas manusia lintas negara, termasuk dalam sektor ketenagakerjaan internasional yang melibatkan pekerja migran. Pembatasan mobilitas dan kebijakan lockdown yang diterapkan oleh berbagai negara berdampak langsung pada stabilitas pasar tenaga kerja global.

Dampak pandemi COVID-19 juga terlihat pada sektor perekonomian global yang mengalami penurunan pertumbuhan secara signifikan. *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* memproyeksikan penurunan pertumbuhan ekonomi global hingga mencapai angka negatif pada kuartal awal pandemi, yang menunjukkan terjadinya resesi ekonomi secara luas (Liu et al., 2020). Indonesia sebagai bagian dari sistem ekonomi global turut merasakan dampak tersebut, terutama pada sektor tenaga kerja dan mobilitas pekerja migran. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah Indonesia menjadi langkah strategis dalam menekan penyebaran virus, namun di sisi lain berdampak pada aktivitas ekonomi dan peluang kerja masyarakat (Abdullah, 2021).

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian nasional karena memberikan kontribusi melalui remitansi yang membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di daerah asal. Remitansi PMI menjadi salah satu sumber pendapatan yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga serta meningkatkan taraf hidup masyarakat (Deva zhalzha Amalia & Pratiwi, 2024). Korea Selatan menjadi salah satu negara tujuan utama PMI karena menawarkan peluang kerja yang cukup besar di berbagai sektor seperti konstruksi, manufaktur, dan pertanian. Kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam penempatan tenaga kerja telah berlangsung sejak tahun 2004 melalui skema *Government to Government* (G-to-G) yang bertujuan untuk mengatur penempatan tenaga kerja secara legal dan terstruktur.

Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan besar dalam dinamika penempatan PMI ke Korea Selatan. Pembatasan mobilitas internasional, penghentian sementara kegiatan industri, serta penurunan permintaan tenaga kerja menyebabkan penurunan jumlah penempatan PMI secara signifikan. Penurunan penempatan PMI selama pandemi diperkirakan mencapai 10,28% dan banyak pekerja migran yang terpaksa dipulangkan ke Indonesia akibat berakhirnya kontrak kerja atau pemutusan hubungan kerja (Noveria & Romdiati, 2022; Sulaeman et al., 2022). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi PMI dan menuntut adanya strategi pemulihan penempatan tenaga kerja secara efektif.

Selain penurunan penempatan, PMI juga menghadapi berbagai permasalahan selama pandemi, seperti kehilangan pekerjaan, keterlambatan pembayaran upah, keterbatasan akses kesehatan, dan lemahnya perlindungan hukum. Beberapa sektor yang paling terdampak antara lain konstruksi, perhotelan, restoran, dan manufaktur akibat penutupan proyek serta penurunan aktivitas industri (Bahari, 2023; Dusep Malik, 2020). Kondisi ini memperlihatkan bahwa PMI berada dalam posisi yang rentan ketika terjadi krisis global, sehingga diperlukan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan menjamin keberlanjutan penempatan tenaga kerja.

Dalam konteks kerja sama bilateral, skema *Government to Government* (G-to-G) antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi salah satu mekanisme penting dalam meningkatkan perlindungan dan penempatan PMI. Skema ini diatur melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dan Ministry of Employment and Labor Korea Selatan yang mengatur proses seleksi, pelatihan, penempatan, serta perlindungan hukum bagi PMI (BP2MI, 2021). Skema G-to-G bertujuan untuk memastikan bahwa penempatan tenaga kerja dilakukan secara transparan, legal, dan sesuai dengan standar internasional.

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Yogyakarta sebagai perwakilan BP2MI di tingkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan penempatan PMI ke Korea Selatan. BP3MI Yogyakarta bertugas dalam penyebaran informasi, verifikasi dokumen, orientasi pra-pemberangkatan, pemberkasan skema G-to-G, serta pengawasan perlindungan pekerja migran. Peran ini menjadi semakin penting dalam masa pemulihan pasca pandemi untuk memastikan bahwa proses penempatan PMI dapat berjalan secara optimal dan aman (BP2MI, 2022a).

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, BP3MI Yogyakarta masih menghadapi sejumlah kendala dalam meningkatkan penempatan PMI ke Korea Selatan. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman calon PMI terhadap prosedur kerja luar negeri, serta kompleksitas regulasi

yang semakin ketat pasca pandemi. Selain itu, tantangan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, lembaga penempatan, dan calon PMI juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas program penempatan tenaga kerja migran.

Penelitian ini menjadi penting karena masih terdapat kesenjangan antara kebijakan kerja sama bilateral dan implementasi di lapangan, khususnya dalam upaya meningkatkan penempatan PMI melalui skema G-to-G Korea pasca COVID-19. Kajian mengenai peran BP3MI Yogyakarta dalam mendukung kerja sama internasional dan pemulihan penempatan PMI masih terbatas, sehingga diperlukan penelitian yang mampu memberikan gambaran empiris mengenai strategi dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian hubungan internasional, khususnya terkait migrasi tenaga kerja dan kerja sama bilateral.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya BP3MI Yogyakarta dalam meningkatkan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Korea Selatan melalui skema *Government to Government* (G-to-G) pasca COVID-19 tahun 2023. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta memberikan rekomendasi strategi yang dapat mendukung keberlanjutan kerja sama bilateral Indonesia dan Korea Selatan dalam penempatan pekerja migran Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu dengan memperoleh upah sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. PMI memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena memberikan kontribusi melalui remitansi yang membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di daerah asal. Selain itu, keberadaan PMI juga berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengalaman kerja internasional (Noveria & Romdiati, 2022).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, migrasi tenaga kerja internasional menjadi salah satu strategi yang digunakan negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Migrasi tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik yang mendorong individu untuk mencari peluang kerja di luar negeri (Kwilinski et al., 2022). Oleh karena itu, pengelolaan PMI harus dilakukan secara sistematis melalui kebijakan yang terstruktur agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat ekonomi yang optimal bagi negara dan pekerja migran.

PMI yang bekerja di luar negeri juga menghadapi berbagai tantangan, seperti permasalahan hukum, perlindungan tenaga kerja, serta risiko eksploitasi. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berupaya memberikan perlindungan melalui regulasi dan kerja sama internasional dengan negara tujuan. Perlindungan tersebut mencakup penyediaan informasi, bantuan hukum, serta pengawasan terhadap kondisi kerja PMI di luar negeri (Sari, 2024).

Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional merupakan hubungan antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui kesepakatan tertentu. Dalam konteks ketenagakerjaan, kerja sama internasional menjadi penting untuk mengatur mobilitas tenaga kerja lintas negara serta menjamin perlindungan tenaga kerja migran. Kerja sama internasional dapat memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan stabilitas ekonomi serta keamanan tenaga kerja di negara tujuan (Kumala et al., 2021).

Kerja sama internasional dalam bidang ketenagakerjaan biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian bilateral atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja. Melalui kerja sama ini, kedua negara dapat mengatur proses seleksi, pelatihan, penempatan, serta perlindungan tenaga kerja secara lebih terstruktur. Selain itu, kerja sama internasional juga berperan dalam mengurangi dampak krisis global seperti pandemi COVID-19 terhadap sektor tenaga kerja (Begishev et al., 2023).

Dengan adanya kerja sama internasional yang kuat, proses penempatan tenaga kerja migran dapat berjalan lebih efektif dan aman. Negara pengirim tenaga kerja dapat memastikan bahwa warganya

mendapatkan perlindungan hukum, sementara negara penerima tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri.

Skema *Government to Government* (G-to-G)

Skema *Government to Government* (G-to-G) merupakan bentuk kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia secara legal dan terstruktur. Program ini telah berjalan sejak tahun 2004 dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Korea Selatan sekaligus memberikan perlindungan kepada PMI melalui mekanisme seleksi dan penempatan yang transparan.

Melalui skema G-to-G, proses penempatan PMI dilakukan secara terpusat oleh lembaga resmi, yaitu BP2MI di Indonesia dan *Human Resource Development Korea* (HRD Korea) di Korea Selatan. Program ini mencakup berbagai tahapan seperti seleksi administrasi, ujian bahasa Korea (EPS-TOPIK), pelatihan keterampilan, kontrak kerja, serta perlindungan hukum selama bekerja di Korea Selatan.

Skema G-to-G juga diatur dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) antara kedua negara yang mencakup pengaturan biaya, persyaratan pendaftaran, kontrak kerja, sistem seleksi, serta perlindungan hukum bagi PMI. Undang-undang Korea Selatan seperti *Foreign Employment Act, Immigration Control Act*, dan *Labor Standards Act* menjadi dasar perlindungan hukum bagi PMI selama bekerja di negara tersebut. Dengan adanya skema G-to-G, diharapkan penempatan PMI dapat dilakukan secara lebih aman, transparan, dan efisien, serta dapat mengurangi praktik penempatan ilegal yang merugikan pekerja migran.

Dampak COVID-19 terhadap Pekerja Migran

Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap mobilitas tenaga kerja internasional, termasuk Pekerja Migran Indonesia. Pembatasan perjalanan internasional dan kebijakan lockdown menyebabkan penurunan jumlah penempatan PMI serta meningkatnya jumlah pemulangan pekerja migran ke Indonesia. Dampak pandemi terhadap pekerja migran tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis (Noveria & Romdiati, 2022).

Data menunjukkan bahwa sekitar 176.000 PMI dipulangkan ke Indonesia pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan sosial bagi pekerja migran dan keluarganya (Sulaeman et al., 2022). Selain itu, penutupan sektor industri di negara tujuan seperti Korea Selatan juga mengurangi permintaan tenaga kerja asing sehingga memperburuk kondisi PMI.

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada perekonomian global dan nasional, yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan ketenagakerjaan. Kondisi ini menuntut adanya strategi pemulihan penempatan tenaga kerja migran melalui kerja sama internasional dan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan situasi global (Abdullah, 2021; Syukur et al., 2021).

Peran BP3MI dalam Perlindungan dan Penempatan PMI

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan kebijakan pemerintah terkait penempatan dan perlindungan PMI di daerah. BP3MI bertugas dalam memberikan pelayanan informasi, verifikasi dokumen, pelatihan, serta pengawasan terhadap proses penempatan tenaga kerja migran.

Dalam konteks kerja sama Indonesia dan Korea Selatan, BP3MI Yogyakarta berperan dalam meningkatkan kualitas penempatan PMI melalui pelatihan keterampilan, pembekalan bahasa Korea, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses rekrutmen. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing PMI serta memastikan proses penempatan berjalan secara transparan dan efisien.

Selain itu, BP3MI juga memperkuat kerja sama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah Korea Selatan, kedutaan besar, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan perlindungan PMI selama bekerja di luar negeri. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan sistem penempatan PMI dapat berjalan lebih aman dan berkelanjutan.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kerja sama internasional dalam penempatan tenaga kerja migran memiliki peran penting dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran.

Andriani & Kenepri (2024) menyatakan bahwa BP2MI memiliki peran penting dalam melindungi PMI di Korea Selatan melalui program G-to-G yang mengedepankan transparansi dan perlindungan hukum.

Penelitian Noveria & Romdiati (2022) juga menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap kondisi ekonomi PMI dan keluarganya, sehingga diperlukan kebijakan yang adaptif dalam penempatan tenaga kerja migran. Sementara itu, Kumala et al. (2021) menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam mengurangi dampak krisis global terhadap sektor tenaga kerja dan ekonomi.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerja sama internasional, perlindungan tenaga kerja migran, serta peran lembaga pemerintah menjadi faktor penting dalam meningkatkan penempatan PMI, khususnya melalui skema G-to-G Korea Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis upaya Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Yogyakarta dalam meningkatkan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan melalui skema *Government to Government* (G-to-G) pasca COVID-19. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, kebijakan, serta peran BP3MI Yogyakarta dalam pelaksanaan program penempatan PMI berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai upaya lembaga dalam meningkatkan penempatan PMI (Sugiyono, 2019).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui kegiatan magang di BP3MI Yogyakarta. Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan kondisi aktual melalui interaksi langsung dengan objek penelitian sehingga dapat menggambarkan fenomena secara komprehensif (Moleong, 2017). Dalam penelitian ini, penulis terlibat langsung dalam kegiatan operasional BP3MI Yogyakarta sehingga dapat memahami sistem kerja, program penempatan PMI, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi skema G-to-G Korea.

Lokasi penelitian dilaksanakan di BP3MI Yogyakarta yang beralamat di Jl. Candi Sambisari No.311a, Juwangen, Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada peran strategis BP3MI sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Kegiatan magang dan pengumpulan data dilaksanakan selama periode 21 Agustus sampai 21 September 2024 sesuai dengan ketentuan program studi dan kebijakan instansi tempat magang.

Subjek penelitian dalam studi ini adalah pegawai BP3MI Yogyakarta, khususnya pada unit pelayanan publik, unit kelembagaan, dan unit perlindungan yang terlibat langsung dalam proses penempatan PMI ke Korea Selatan melalui skema G-to-G. Selain itu, dokumen dan kebijakan terkait program penempatan PMI juga menjadi sumber data penting dalam penelitian ini. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa pihak-pihak tersebut memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Creswell, 2014).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas kerja BP3MI Yogyakarta, termasuk proses pelayanan publik, penyebaran informasi lowongan kerja, serta mekanisme penempatan PMI. Wawancara dilakukan kepada pegawai BP3MI untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, program, serta kendala yang dihadapi dalam meningkatkan penempatan PMI ke Korea Selatan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa laporan kegiatan, peraturan, MoU kerja sama Indonesia–Korea Selatan, serta arsip terkait program G-to-G Korea. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2019).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Selanjutnya, penarikan kesimpulan

dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Miles, M. B., & Huberman, 2014).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari BP3MI Yogyakarta. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan keakuratan hasil penelitian (Creswell, 2014).

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya BP3MI Yogyakarta dalam meningkatkan penempatan PMI ke Korea Selatan melalui skema G-to-G pasca COVID-19. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penempatan PMI di tingkat daerah, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan kebijakan ketenagakerjaan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Yogyakarta memiliki peran strategis dalam mendukung penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya dalam menghadapi tantangan pasca pandemi COVID-19. BP3MI Yogyakarta sebagai perpanjangan tangan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berfungsi sebagai pusat pelayanan yang mencakup perencanaan program, penyebaran informasi, rekrutmen, verifikasi dokumen, hingga perlindungan PMI di negara tujuan. Peran ini menjadi sangat penting mengingat PMI memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi serta peningkatan kesejahteraan keluarga di daerah asal (Deva zhalzha Amalia & Pratiwi, 2024). Dengan adanya fungsi kelembagaan yang terstruktur, BP3MI Yogyakarta berupaya memastikan bahwa proses penempatan PMI berjalan secara prosedural dan sesuai dengan regulasi yang berlaku (BP2MI, 2022c).

Struktur organisasi BP3MI Yogyakarta yang terdiri dari kepala balai, sub bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional, serta koordinator pelayanan fungsional menunjukkan adanya sistem manajemen kelembagaan yang terintegrasi dalam mendukung pelayanan PMI. Struktur ini memungkinkan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan program penempatan dan perlindungan PMI, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi program. Keberadaan struktur organisasi yang jelas juga mendukung implementasi kebijakan perlindungan PMI secara optimal, terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul selama pandemi COVID-19 seperti kehilangan pekerjaan, keterlambatan upah, dan keterbatasan akses layanan kesehatan (Noveria & Romdiati, 2022). Dengan demikian, BP3MI Yogyakarta tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai institusi yang berperan dalam menjaga stabilitas tenaga kerja migran.

Pada unit pelayanan publik, hasil penelitian menunjukkan bahwa BP3MI Yogyakarta menyediakan layanan administrasi yang komprehensif bagi calon PMI, termasuk pendaftaran melalui sistem SISKOM, verifikasi data, orientasi pra pemberangkatan (OOP), serta penerbitan E-PMI. Sistem pelayanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon PMI memiliki kesiapan administrasi, kompetensi, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebelum bekerja di luar negeri. Fasilitas pelayanan yang tersedia, seperti ruang pendaftaran dan tempat pelatihan OOP, menjadi bukti bahwa BP3MI Yogyakarta berupaya meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas penempatan PMI secara legal dan terstruktur guna meminimalkan risiko penempatan nonprosedural (Bahari, 2023).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa unit kelembagaan dan unit perlindungan BP3MI Yogyakarta memiliki peran penting dalam memperluas informasi peluang kerja dan memberikan perlindungan bagi PMI di negara tujuan, termasuk Korea Selatan. Unit kelembagaan bertugas mengelola skema penempatan seperti *government-to-government* (G2G), mandiri, dan swasta, serta menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan layanan komunikasi terpadu. Sementara itu, unit perlindungan bertanggung jawab dalam memastikan PMI mendapatkan perlindungan selama bekerja di luar negeri hingga proses kepulangan ke Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat PMI rentan terhadap berbagai permasalahan seperti pelanggaran hak tenaga kerja, keterlambatan gaji, dan kondisi kerja yang tidak layak selama pandemi COVID-19 (Dusep Malik, 2020; Lumbanrau, 2020).

Selain itu, unit tata usaha BP3MI Yogyakarta berperan dalam mendukung operasional lembaga melalui pengelolaan administrasi, keuangan, arsip, serta pelaporan program secara sistematis. Pengelolaan administrasi yang baik memungkinkan BP3MI Yogyakarta menjalankan fungsi perlindungan dan penempatan PMI secara efektif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa BP3MI Yogyakarta memiliki peran yang signifikan dalam mendukung penempatan PMI ke Korea Selatan pasca COVID-19 melalui pelayanan publik yang terintegrasi, perlindungan tenaga kerja, serta penguatan kelembagaan. Peran ini menjadi penting dalam memastikan keberlanjutan penempatan PMI yang aman, legal, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya (BP2MI, 2022b; Noveria & Romdiati, 2022).

Pembahasan

A. Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama melalui kontribusi remitansi yang dikirimkan kepada keluarga di Indonesia. Remitansi PMI menjadi salah satu sumber pendapatan penting yang membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, remitansi juga berkontribusi terhadap stabilitas neraca pembayaran negara dan penguatan ekonomi nasional. Data menunjukkan bahwa remitansi PMI mencapai miliaran dolar setiap tahun, sehingga menjadi salah satu penyumbang signifikan dalam perekonomian Indonesia (Deva zhalzha Amalia & Pratiwi, 2024). Peran ekonomi PMI ini menunjukkan bahwa keberadaan tenaga kerja migran tidak hanya berdampak pada individu dan keluarga, tetapi juga pada pembangunan ekonomi nasional secara lebih luas.

Namun, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan pekerjaan PMI di Korea Selatan. Pembatasan mobilitas internasional, penutupan sektor industri, serta kebijakan lockdown menyebabkan banyak PMI kehilangan pekerjaan atau mengalami penundaan penempatan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian ekonomi yang tinggi bagi PMI, baik yang masih berada di Korea Selatan maupun yang harus kembali ke Indonesia akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Situasi ini menunjukkan bahwa krisis global seperti pandemi dapat mempengaruhi stabilitas tenaga kerja migran secara langsung, terutama pada sektor-sektor yang bergantung pada mobilitas dan aktivitas ekonomi internasional (Noveria & Romdiati, 2022).

Dampak kehilangan pekerjaan paling banyak terjadi pada sektor konstruksi, perhotelan, restoran, dan manufaktur yang menjadi sektor utama penempatan PMI di Korea Selatan. Penurunan investasi konstruksi, penurunan jumlah wisatawan, serta penghentian produksi industri menyebabkan banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menekan biaya operasional. Penurunan investasi konstruksi sebesar 1,3% pada kuartal II tahun 2020 serta penurunan wisatawan sebesar 78,6% menjadi bukti bahwa pandemi memberikan tekanan besar terhadap sektor ekonomi di Korea Selatan (Bahari, 2023; Dusep Malik, 2020). Kondisi ini memperlihatkan bahwa PMI berada pada posisi rentan dalam struktur tenaga kerja global karena sangat bergantung pada stabilitas ekonomi negara tujuan.

Selain kehilangan pekerjaan, permasalahan keterlambatan pembayaran upah juga menjadi tantangan serius yang dihadapi PMI selama pandemi COVID-19. Banyak PMI yang masih bekerja mengalami

keterlambatan gaji, pemotongan upah, hingga kerja lembur tanpa insentif yang memadai. Penurunan remitansi sebesar 10,28% selama pandemi menunjukkan adanya tekanan finansial yang cukup besar bagi PMI dan keluarganya di Indonesia (Noveria & Romdiati, 2022). Laporan pelanggaran hak tenaga kerja juga menunjukkan bahwa beberapa PMI mengalami gaji tidak dibayar dan kondisi kerja yang tidak layak, yang semakin memperburuk kondisi ekonomi dan psikologis pekerja migran (Lumbanrau, 2020). Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan tenaga kerja migran melalui regulasi dan kerja sama bilateral antara negara pengirim dan penerima tenaga kerja.

Permasalahan lain yang dihadapi PMI adalah keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan selama pandemi COVID-19, terutama bagi PMI yang tidak memiliki dokumen resmi. PMI non-dokumen cenderung enggan mengakses layanan kesehatan karena takut deportasi dan kurangnya informasi mengenai hak-hak mereka. Kondisi ini menyebabkan banyak PMI tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai serta mengalami tekanan mental akibat ketidakpastian selama pandemi (Lumbanrau, 2020; Ummah, 2019). Selain itu, keterbatasan layanan kesehatan mental juga menyebabkan PMI mengalami stres dan kecemasan yang meningkat, sementara akses terhadap dukungan psikologis masih terbatas.

Meskipun demikian, pemerintah Korea Selatan bersama organisasi internasional seperti IOM dan KOICA telah berupaya memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan bagi pekerja migran selama pandemi COVID-19. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan PMI tetap mendapatkan akses layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan selama masa krisis. Program bantuan kesehatan dan kebijakan perlindungan pekerja migran menjadi langkah penting dalam menjaga kesejahteraan PMI di negara tujuan (IOM, 2021). Namun, kendala administratif seperti kelengkapan dokumen masih menjadi hambatan utama dalam akses layanan kesehatan, sehingga diperlukan penguatan kerja sama bilateral dan kebijakan perlindungan yang lebih komprehensif bagi PMI di Korea Selatan.

B. Skema *Govorment to Goverment* Korea Selatan (G to G Korea)

Skema *Government to Government* (G to G) Korea Selatan merupakan bentuk kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta meningkatkan transparansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Penerapan Employment Permit System (EPS) sejak tahun 2004 menjadi dasar utama kerja sama ini, yang kemudian diperkuat melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dan *Ministry of Employment and Labor* (MOEL) Korea Selatan. Kerja sama ini menekankan pada perlindungan tenaga kerja asing, pencegahan PMI ilegal, serta penyediaan mekanisme seleksi yang transparan dan terstruktur (BP2MI, 2022b).

MoU dalam skema G to G Korea mengatur berbagai aspek penting seperti penunjukan lembaga pelaksana, pengaturan biaya, ujian bahasa EPS-TOPIK, persyaratan administrasi, kontrak kerja, serta perlindungan hukum bagi PMI di Korea Selatan. BP2MI bertindak sebagai lembaga pengirim tenaga kerja dari Indonesia, sedangkan *Human Resource Development Korea* (HRD Korea) berperan sebagai lembaga penerima tenaga kerja di Korea Selatan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemerintah kedua negara berupaya menciptakan sistem penempatan tenaga kerja yang terstruktur, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan pekerja migran melalui koordinasi antar lembaga yang jelas (BP2MI, 2022b; Foreign Employment Act, 2003).

Implementasi skema G to G Korea juga terlihat dari kerja sama BP2MI dengan *Hyundai Heavy Industry* (HHI) dalam penempatan PMI melalui Visa E-7 pada sektor industri berat. Kerja sama ini menunjukkan adanya peningkatan peluang kerja bagi PMI dengan keterampilan khusus tanpa adanya diskriminasi antara tenaga kerja lokal dan asing. Hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi faktor penting dalam memperluas kesempatan kerja bagi PMI, sekaligus memastikan perlindungan yang kuat melalui regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Korea Selatan (BP2MI, 2022a).

Dalam pelaksanaannya, BP2MI dan BP3MI memiliki peran strategis dalam proses seleksi dan pemberkasan PMI sebelum diberangkatkan ke Korea Selatan. Proses seleksi meliputi pendaftaran calon PMI, ujian EPS-TOPIK, uji keterampilan, verifikasi dokumen, hingga penandatanganan kontrak kerja yang difasilitasi oleh BP2MI. Mekanisme ini menunjukkan bahwa skema G to G mampu mengurangi risiko PMI ilegal serta meningkatkan transparansi dalam proses penempatan tenaga kerja. Selain itu, keterlibatan

BP3MI dalam pemberkasan dan pendataan PMI memberikan kontribusi nyata dalam memastikan kelengkapan dokumen dan kesiapan calon PMI sebelum keberangkatan (BP3MI Yogyakarta, 2023)

Dari sisi sektor pekerjaan, pemerintah Korea Selatan menawarkan peluang kerja bagi PMI pada sektor manufaktur, perikanan, dan jasa. Sektor manufaktur menjadi salah satu sektor utama karena tingginya kebutuhan tenaga kerja akibat minimnya minat pekerja lokal pada industri berat. Selain itu, sektor perikanan juga menjadi fokus kerja sama melalui MoU khusus untuk nelayan, yang bertujuan memperbaiki sistem rekrutmen serta mengurangi risiko penyalahgunaan tenaga kerja. Sementara itu, sektor jasa berkembang pesat seiring pertumbuhan industri non-material di Korea Selatan, sehingga membuka peluang kerja baru bagi PMI di berbagai bidang layanan (Gokkon, 2022; Ju-yeon, 2024).

Secara keseluruhan, skema *Government to Government* Korea menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan penempatan PMI secara legal, aman, dan terstruktur pasca COVID-19. Kolaborasi antara BP2MI, BP3MI, HRD Korea, dan pemerintah Korea Selatan menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem penempatan tenaga kerja yang transparan dan berkelanjutan. Melalui mekanisme seleksi yang ketat, perlindungan hukum yang jelas, serta peluang kerja yang luas di berbagai sektor industri, skema G to G Korea diharapkan dapat terus meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang ketenagakerjaan (BP2MI, 2022c;BP3MI Yogyakarta, 2023).

C. Upaya BP3MI Yogyakarta dalam Meningkatkan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan Pasca COVID-19

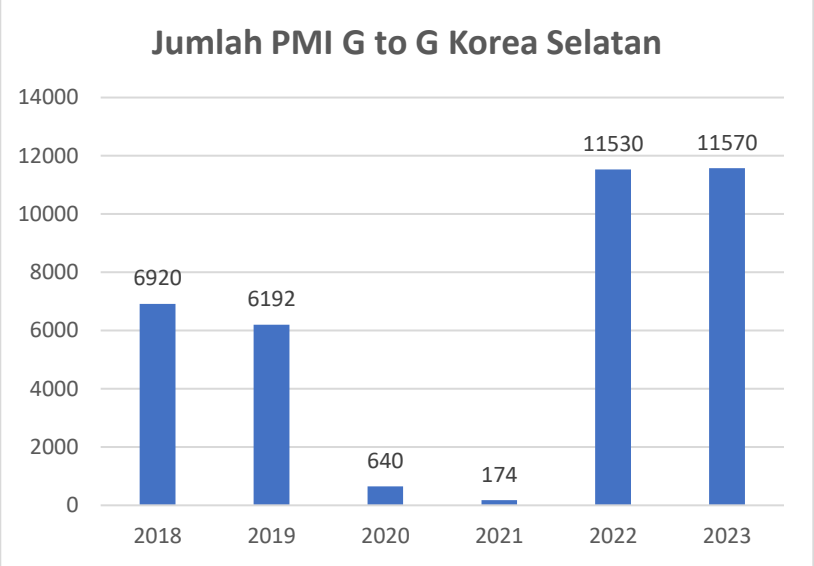
Upaya BP3MI Yogyakarta dalam meningkatkan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan pasca COVID-19 menunjukkan peran strategis lembaga pemerintah dalam memulihkan sistem ketenagakerjaan internasional yang sempat terganggu akibat pandemi. Pembatasan mobilitas internasional, perubahan kebijakan ketenagakerjaan, serta penurunan aktivitas ekonomi global menyebabkan terhambatnya proses penempatan PMI, khususnya pada sektor manufaktur, perikanan, dan pertanian di Korea Selatan. Oleh karena itu, BP3MI Yogyakarta berupaya melakukan adaptasi melalui peningkatan pelatihan, digitalisasi sistem rekrutmen, serta penguatan kerja sama internasional guna memastikan keberlanjutan penempatan PMI secara legal dan aman (Andriani & Kenepri, 2024; BP2MI, 2023).

Dalam konteks skema *Government to Government* (G to G) Korea, BP3MI Yogyakarta memiliki peran penting sebagai perpanjangan BP2MI dalam mempersiapkan calon PMI agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja Korea Selatan. Skema G to G yang berbasis Employment Permit System (EPS) menuntut calon PMI memiliki kompetensi bahasa, keterampilan teknis, serta kelengkapan administrasi yang sesuai dengan standar Korea Selatan. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan dan pembekalan keterampilan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing PMI di pasar kerja internasional serta mengurangi risiko kegagalan penempatan akibat ketidaksesuaian kompetensi (BP2MI, 2022a; Ju-yeon, 2024).

Peningkatan pelatihan dan pembekalan keterampilan yang dilakukan BP3MI Yogyakarta berfokus pada sektor-sektor utama seperti pertanian, perikanan, dan manufaktur. Pelatihan bahasa Korea melalui EPS-TOPIK menjadi komponen utama dalam proses seleksi, karena kemampuan bahasa merupakan syarat dasar dalam komunikasi kerja dan adaptasi budaya di Korea Selatan. Selain itu, pelatihan teknis seperti penggunaan teknologi pertanian modern, teknik budidaya perikanan, serta pengoperasian mesin industri di sektor manufaktur menjadi bagian penting dalam meningkatkan kompetensi PMI. Program pelatihan ini menunjukkan bahwa BP3MI Yogyakarta berupaya menyesuaikan kualitas tenaga kerja dengan kebutuhan industri Korea Selatan yang semakin berkembang pasca pandemi (Andriani & Kenepri, 2024;BP3MI Yogyakarta, 2023).

Selain peningkatan pelatihan, BP3MI Yogyakarta juga mengoptimalkan sistem rekrutmen dan seleksi melalui teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Digitalisasi sistem pendaftaran dan seleksi memungkinkan calon PMI untuk mengakses informasi dan mengikuti proses rekrutmen secara online, sehingga mengurangi potensi penipuan dan praktik percaloan yang sering terjadi dalam sistem manual. Penerapan teknologi digital ini juga memudahkan BP3MI dalam melakukan verifikasi data, pemantauan proses seleksi, serta pengelolaan database PMI secara lebih terstruktur dan akuntabel. Dengan demikian, sistem digital mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penempatan PMI ke Korea Selatan (BP2MI, 2022c; Farida, 2023).

Upaya peningkatan perlindungan PMI juga menjadi fokus utama BP3MI Yogyakarta, terutama dalam menyediakan layanan pengaduan, jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, serta pemfasilitasan pemulangan PMI yang mengalami masalah di negara tujuan. Penyediaan hotline 24 jam, layanan konseling, dan bantuan hukum menjadi langkah konkret dalam memastikan perlindungan PMI sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah pengaduan PMI yang menunjukkan masih adanya permasalahan seperti gaji tidak dibayar, penipuan, dan kegagalan keberangkatan, sehingga diperlukan sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi (Farida, 2023; Sari, 2024).



Gambar 1. Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui Skema G to G Korea Selatan sesuai Jabatan Pada Tahun 2020-2023

Berdasarkan Gambar 1, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam program G to G Korea Selatan periode 2018–2023 mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2018 tercatat 6.920 pekerja dan menurun menjadi 6.192 pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 menjadi 640 pekerja dan 174 pekerja pada tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas tenaga kerja. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan menjadi 11.530 pekerja dan meningkat kembali menjadi 11.570 pekerja pada tahun 2023, yang menunjukkan adanya pemulihan pasar tenaga kerja Korea Selatan serta meningkatnya kembali peluang penempatan PMI melalui program G to G (BP2MI, 2021, 2022a, 2023).

Tabel 1. Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui Skema G to G Korea Selatan sesuai Jabatan Pada Tahun 2020-2023

Jumlah PMI G To G Korea Selatan Sesuai Jabatan					
Jabatan	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Jumlah**
Manufacturing	0	0	0	4.445	4.445
Operator	638	174	8.913	4.268	13.993
Fisherman	2	0	2.616	2.828	5.446
Ship’s Engineer	0	0	0	28	28
Occasion Director	0	0	0	1	1
Oil Mixing Worker	0	0	1	0	1
Total	**640**	**174**	**11.530**	**11.570**	**23.914**

Berdasarkan Tabel 1 pada tahun 2023 jabatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan melalui skema *Government to Government* (G to G) ke Korea Selatan didominasi oleh Manufacturing Worker sebanyak 4.445, diikuti Operator 4.268, Fisherman 2.828, dan Ship's Engineers 28. Dibandingkan tahun sebelumnya, *Manufacturing Worker* mengalami peningkatan signifikan sebesar 100%, Operator menurun 52% dari 4.645, sementara Fisherman meningkat 8% dan Ship's Engineers juga mengalami kenaikan. Secara keseluruhan dalam periode 2020–2023, jabatan terbanyak PMI di Korea Selatan adalah Operator dengan total 13.993, diikuti Fisherman 5.446 dan *Manufacturing Worker* 4.445.

Data penempatan PMI melalui skema G to G Korea Selatan menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan selama periode 2018 hingga 2023. Penurunan drastis pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas tenaga kerja internasional, sementara peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan pemulihan pasar tenaga kerja Korea Selatan. Lonjakan jumlah PMI hingga lebih dari 11.000 pekerja pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi Korea Selatan serta strategi BP2MI dan BP3MI dalam meningkatkan pelatihan dan rekrutmen telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan penempatan PMI (BP2MI, 2022a, 2023).

Berdasarkan data jabatan PMI yang ditempatkan melalui skema G to G Korea Selatan, sektor manufaktur dan operator menjadi posisi yang paling banyak menyerap tenaga kerja Indonesia, diikuti oleh sektor perikanan. Dominasi sektor manufaktur menunjukkan tingginya kebutuhan tenaga kerja asing di industri Korea Selatan, terutama karena minimnya minat pekerja lokal pada sektor industri berat. Sementara itu, peningkatan jumlah fisherman menunjukkan bahwa sektor perikanan juga menjadi sektor strategis dalam kerja sama ketenagakerjaan Indonesia dan Korea Selatan. Kondisi ini memperkuat pentingnya pelatihan teknis yang relevan agar PMI dapat memenuhi kebutuhan industri secara optimal (BP2MI, 2023; Gokkon, 2022).

Secara keseluruhan, upaya BP3MI Yogyakarta dalam meningkatkan penempatan PMI ke Korea Selatan pasca COVID-19 dapat dikatakan cukup efektif, terutama melalui peningkatan pelatihan, digitalisasi rekrutmen, serta penguatan perlindungan tenaga kerja. Namun, masih terdapat tantangan seperti rendahnya partisipasi BPJS Ketenagakerjaan, kurangnya dukungan kesehatan mental, serta kebutuhan peningkatan sosialisasi kepada calon PMI di daerah. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara BP3MI, BP2MI, pemerintah Korea Selatan, serta stakeholder lainnya untuk menciptakan sistem penempatan PMI yang berkelanjutan, aman, dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan (Andriani & Kenepri, 2024; BP2MI, 2023; Farida, 2023).

SIMPULAN

Upaya Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Yogyakarta dalam meningkatkan kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan melalui skema *Government to Government* (G to G) pasca COVID-19 menunjukkan hasil yang positif dalam memperbaiki sistem penempatan tenaga kerja migran. Program ini berfokus pada peningkatan perlindungan, pelatihan, serta penyederhanaan prosedur rekrutmen guna menjawab tantangan penempatan PMI selama dan setelah pandemi. Fluktuasi jumlah PMI pada periode 2018–2023 yang sempat menurun drastis pada masa pandemi namun kembali meningkat signifikan pada tahun 2022–2023 menunjukkan bahwa kerja sama bilateral Indonesia dan Korea Selatan melalui skema G to G mampu mendorong pemulihan pasar tenaga kerja serta membuka kembali peluang kerja bagi PMI secara legal, aman, dan terstruktur.

BP3MI Yogyakarta telah melaksanakan berbagai strategi untuk mendukung implementasi skema G to G, seperti peningkatan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan industri Korea Selatan, pelatihan bahasa Korea melalui EPS-TOPIK, digitalisasi sistem rekrutmen, serta penguatan mekanisme perlindungan PMI sebelum dan selama bekerja di luar negeri. Dominasi jabatan pada sektor manufaktur, operator, dan perikanan menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja Korea Selatan masih berfokus pada sektor industri dan kelautan, sehingga upaya peningkatan kompetensi teknis dan kesiapan administrasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing PMI. Dengan adanya sistem pelatihan, rekrutmen digital, dan perlindungan yang terintegrasi, BP3MI Yogyakarta berperan signifikan dalam memastikan penempatan PMI berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas kerja sama penempatan PMI ke Korea Selatan, BP3MI Yogyakarta disarankan untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai stakeholder, baik di Indonesia maupun di Korea Selatan, termasuk BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Korea Selatan, serta lembaga ketenagakerjaan Korea. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar lembaga sangat penting untuk memastikan perlindungan PMI berjalan optimal, terutama dalam hal pemantauan kondisi kerja, penyelesaian permasalahan tenaga kerja, serta pemenuhan hak-hak PMI di negara tujuan.

Selain itu, BP3MI Yogyakarta perlu meningkatkan kualitas pelatihan yang lebih terfokus pada kebutuhan industri Korea Selatan, khususnya sektor manufaktur, perikanan, dan pertanian, serta memperkuat pelatihan bahasa Korea yang berbasis kebutuhan kerja. Pengembangan sistem rekrutmen berbasis teknologi digital juga perlu terus diperluas untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses penempatan PMI, sekaligus meminimalkan praktik penipuan dan penempatan nonprosedural. Dengan langkah tersebut, diharapkan kerja sama G to G Indonesia–Korea Selatan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kesejahteraan PMI serta penguatan hubungan bilateral kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. (2021). Dampak Covid 19 Bagi Perekonomian Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *2*(3), 376. http://jiss.publikasiindonesia.id/

Andriani, R., & Kenepri. (2024). *Peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Bp2mi) Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Korea Selatan Pada Program G To G*. Sosial Humaniora, 2(1.

Bahari, G. B. (2023). Upaya Pemulihan Pariwisata Korea Selatan Dari Pandemi Covid-19. *Journal of International Relatios*, *9*(2), 42–60.

Begishev, I., Hajiyev, H., Yumashev, A., Abdullayev, I., Limareva, Y., & Prodanova, N. (2023). Impact of International Migration on the Internal Security of the State Migration Letters Impact of International Migration on the Internal Security of the State. *Migration Letters*, *S4*, 424–433. https://doi.org/10.47059/ml.v20iS4.3860

BP2MI. (2021). Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode 2020. *Pusat Data Dan Informasi*, *250*.

BP2MI. (2022a). Data Pekerja Migran Indonesia Peroide Tahun 2021. *Pusat Data Dan Informasi*, *I*, 13. https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_11-04-2022_Laporan_Publikasi_Tahun_2021_Final_23022022.pdf

BP2MI. (2022b). *Kepala BP2MI : Pastikan Pemulangan PMI Sesuai Prokes*. https://bp2mi.go.id/berita-detail/kepala-bp2mi-pastikan-pemulangan-pmi-sesuai-prokes

BP2MI. (2022b). *Bersama Hyundai Korsel, Kepala BP2MI Sambut Positif Peluang Penempatan PMI*. Bp2mi.Go.Id. https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/bersama-hyundai-korsel-kepala-bp2mi-sambut-positif-peluang-penempatan-pmi

BP2MI. (2022c). *Pelepasan PMI ke Korea Selatan, Purna Irawan: Kami Bangga dengan Bapak Jokowi*. https://bp2mi.go.id/berita-detail/pelepasan-pmi-ke-korea-selatan-purna-irawan-kami-bangga-dengan-bapak-jokowi

BP2MI. (2023). Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2023. *Pusat Data Dan Informasi*, *021*, 8.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.

Deva zhalzha Amalia, & Pratiwi, F. S. (2024). *Data Jumlah Remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Negara Asal pada 2023*. https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/data-jumlah-remitansi-pekerja-migran-indonesia-pmi-menurut-negara-asal-pada-2023

Dusep Malik, D. A. (2020). *Dampak COVID-19 Menyebar, Kini Giliran Korea Selatan Resesi Ekonomi*. https://www.viva.co.id/bisnis/1286884-dampak-covid-19-menyebar-kini-giliran-korea-selatan-resesi-ekonomi

Farida, E. (2023). *Pengaduan PMI Perempuan Tahun 2022 Meningkat, Apa yang Terjadi? Bincangperempuan*. Com. https://bincangperempuan.com/pengaduan-pmi-perempuan-tahun-2022-meningkat-apa-yang-terjadi/

Gokkon, B. (2022). *Indonesia pursues agreements to protect its fishers on foreign vessels*. https://news.mongabay.com/2022/09/indonesia-pursues-agreements-to-protect-its-fishers-on-foreign-vessels/

IOM. (2021). *KOICA dan IOM bermitra untuk mengatasi dampak COVID-19 pada pekerja migran Indonesia dan memperkuat upaya mitigasi di berbagai Pintu Masuk di Indonesia. Indonesia*. https://indonesia.iom.int/id/news/koica-dan-iom-bermitra-untuk-mengatasi-dampak-covid-19-pada-pekerja-migran-indonesia-dan-memperkuat-upaya-mitigasi-di-berbagai-pintu-masuk-di-indonesia

Ju-yeon, K. (2024). *Young Koreans shun manufacturing jobs for easier hospitality roles. Koreajoongangdaily*. https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2024-01-17/business/industry/Young-Koreans-shun-manufacturing-jobs-for-easier-hospitality-roles/1959694

Kumala, M. T., Vinata, R. T., Setyowati, J., & Suharti, T. (2021). PENGUATAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM MENGURANGI DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP SEKTOR PERIKANAN DI INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, *50*(2), 119–130.

Kwilinski, A., Lyulyov, O., Pimonenko, T., Dzwigol, H., Abazov, R., & Pudryk, D. (2022). International Migration Drivers: Economic, Environmental, Social, and Political Effects. *Sustainability (Switzerland)*, *14*(11). https://doi.org/10.3390/su14116413

Lumbanrau, R. E. (2020). *Cerita pekerja migran Indonesia di tengah wabah virus corona: Dari tidak digaji, di-PHK, susah beli alat sikat gigi hingga tidur di atas lemari*. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52607651

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). *Sage Publications*.

Moleong, L. J. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif (cetakan ke-36)*. PT Remaja Rosdakarya.

Noveria, M., & Romdiati, H. (2022). Pandemi Covid-19 dan Dampak Ekonomi pada Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya: Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, *13*(1), 71–84. https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.1947

Sari, Y. R. (2024). Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Jamsostek*, *1*(2), 179–197. https://doi.org/10.61626/jamsostek.v1i2.16

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sulaeman, E., Indra, M. B., Imas, M., & Karmelita. (2022). Analisis dampak covid 19 di bidang ketenagakerjaan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, *9*(3), 392–400.

Syukur, M., Salam, M. N., & Junaidi, M. I. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis terhadap Sektor Domestik dan Stabilitas Inflasi. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, *2*(3), 382–388. https://doi.org/10.33650/trilogi.v2i3.3082

Ummah, M. S. (2019). Labor Market Brief. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y